

Memperkuat Literasi Bahasa: Mengintegrasikan Kebijakan Bahasa dalam Pendidikan

Salma Munbait Baharuddin¹, Putri Ananda Nur², Ulfa Fausiah³, Anita Candra Dewi⁴

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar
email: munbaitssalma@gmail.com¹, putrianandanur2084@gmail.com², Fauziah99@gmail.com³,
anitacandradewi@unm.ac.id⁴.

Abstrac: Efforts to improve language literacy through education policies are a strategic step in strengthening the role of the Indonesian language as a symbol of national identity and as the main medium for learning. This article examines the implementation of language policies in the world of education, covering various approaches, challenges faced, and the impacts of their implementation. Various efforts have been made, such as the development of a linguistic competency-based curriculum, training for educators, providing relevant teaching materials, and increasing synergy between related institutions in supporting the success of the policy. However, the implementation of this policy still faces a number of obstacles, including differences in language proficiency levels among students, limited teaching staff, and the lack of adequate learning facilities and media. To ensure the effectiveness of this policy, ongoing evaluation and comprehensive integration between language policies and education policies are needed in order to provide optimal impacts on literacy development. Thus, Indonesian language literacy not only functions as a means of communication, but also becomes the main foundation in achieving inclusive and sustainable national education goals.

Keyword: *language literacy, education policy, indonesian language, national identity*

Abstrak: Upaya peningkatan literasi bahasa melalui kebijakan pendidikan menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran bahasa Indonesia sebagai simbol identitas nasional serta sebagai sarana utama dalam pembelajaran. Artikel ini mengkaji implementasi kebijakan bahasa dalam dunia pendidikan, mencakup berbagai pendekatan, tantangan yang dihadapi, serta dampak yang ditimbulkan dari penerapannya. Beragam upaya telah dilakukan, seperti pengembangan kurikulum berbasis kompetensi linguistik, pelatihan bagi tenaga pendidik, penyediaan bahan ajar yang relevan, serta peningkatan sinergi antar lembaga terkait dalam menunjang keberhasilan kebijakan tersebut. Namun, penerapan kebijakan ini masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya perbedaan tingkat kemampuan berbahasa di kalangan peserta didik, keterbatasan tenaga pengajar, serta kurangnya ketersediaan sarana dan media pembelajaran yang memadai. Untuk memastikan efektivitas kebijakan tersebut, diperlukan evaluasi yang berkelanjutan serta integrasi menyeluruh antara kebijakan bahasa dan kebijakan pendidikan agar mampu memberikan dampak yang optimal bagi pengembangan literasi. Dengan demikian, literasi bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi pondasi utama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: literasi bahasa; kebijakan pendidikan; bahasa indonesia; identitas nasional

PENDAHULUAN

Era modern yang didominasi oleh teknologi dan arus globalisasi yang cepat, literasi bahasa Indonesia semakin menjadi aspek penting bagi individu dan masyarakat. Kemampuan literasi kini bukan hanya sekadar keterampilan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup pemahaman serta

pemanfaatan bahasa secara efektif dalam berbagai konteks komunikasi, termasuk komunikasi berbasis digital (Safitri, Marsidin, & Subandi, 2020). Namun demikian, tingkat literasi bahasa di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam lingkungan pendidikan maupun di kalangan

masyarakat umum (Hernadi, Mulia, & Riyanto, 2023).

Salah satu strategi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan menerapkan perencanaan bahasa yang terstruktur dan sistematis. Perencanaan bahasa merupakan upaya yang disengaja untuk mengembangkan, membina, serta menjaga keberlangsungan bahasa nasional agar tetap berfungsi secara optimal di berbagai sektor kehidupan. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah mengintegrasikan kebijakan bahasa ke dalam kurikulum pendidikan guna meningkatkan literasi bahasa Indonesia di kalangan peserta didik.

Seiring dengan perkembangan teknologi, literasi tidak lagi terbatas pada aspek tradisional, tetapi juga mencakup literasi digital. Literasi digital merujuk pada kemampuan seseorang dalam mengakses, memahami, menilai, serta mengkomunikasikan informasi melalui media digital dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab (Suriani & Hadi, 2022). Oleh sebab itu, pendidikan literasi digital perlu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pembelajaran, tidak hanya untuk mendukung kegiatan akademik, tetapi juga untuk membentuk karakter siswa yang adaptif terhadap perubahan zaman (Silalahi, 2021).

Dalam hal ini, guru memiliki peranan penting dalam keberhasilan penerapan kebijakan literasi. Kualitas pengajaran yang berbasis literasi, baik dalam bentuk konvensional maupun digital, sangat bergantung pada kesiapan serta kompetensi pendidik. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan bagi guru agar mereka mampu mengembangkan model pembelajaran yang kreatif, kontekstual, dan berbasis teknologi (Safitri dkk, 2020). Sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan tenaga pendidik

menjadi elemen krusial dalam meningkatkan mutu literasi bahasa Indonesia secara berkelanjutan dan menyeluruh.

Meningkatnya penetrasi teknologi informasi menyebabkan tantangan dalam literasi bahasa semakin luas, tidak hanya dalam memahami teks cetak tetapi juga dalam memproduksi dan menafsirkan informasi dalam bentuk digital. Literasi digital kini menjadi bagian fundamental dalam dunia pendidikan karena dunia kerja dan aktivitas sehari-hari semakin bergantung pada teknologi. Oleh sebab itu, upaya peningkatan literasi bahasa perlu diselaraskan dengan keterampilan berpikir kritis, komunikasi daring, serta pemanfaatan media digital secara produktif dan bertanggung jawab. Dengan mengintegrasikan literasi digital ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik tidak hanya akan mahir dalam berbahasa, tetapi juga akan lebih siap menghadapi perkembangan teknologi yang terus berubah.

Selain itu, guru sebagai ujung tombak pendidikan memiliki peranan strategis dalam implementasi kebijakan bahasa dan literasi di sekolah. Untuk memastikan efektivitas pembelajaran berbasis literasi, pendidik perlu mendapatkan pelatihan serta panduan yang mendukung pembelajaran kontekstual, inovatif, dan berbasis teknologi. Hal ini akan semakin memperkuat langkah sistematis dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa di berbagai jenjang pendidikan. Oleh karena itu, kerja sama antara kebijakan pemerintah, kesiapan institusi pendidikan, serta kapasitas pendidik menjadi faktor utama dalam memperkuat literasi bahasa Indonesia di era digital.

Dengan mengintegrasikan literasi digital ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik tidak hanya akan mahir dalam berbahasa, tetapi juga akan lebih siap

menghadapi perkembangan teknologi yang terus berubah. Selain itu, guru sebagai ujung tombak pendidikan memiliki peranan strategis dalam implementasi kebijakan bahasa dan literasi di sekolah. Untuk memastikan efektivitas pembelajaran berbasis literasi, pendidik perlu mendapatkan pelatihan serta panduan yang mendukung pembelajaran kontekstual, inovatif, dan berbasis teknologi. Hal ini akan semakin memperkuat langkah sistematis dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa di berbagai jenjang pendidikan. Oleh karena itu, kerja sama antara kebijakan pemerintah, kesiapan institusi pendidikan, serta kapasitas pendidik menjadi faktor utama dalam memperkuat literasi bahasa Indonesia di era digital (Handiyani & Abidin, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif sebagai kerangka metodologis utama. Proses kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi integrasi perencanaan linguistik dan kebijakan regulasi dalam konteks edukatif. Melalui penerapan metodologi ini, peneliti bertujuan memperoleh informasi yang kredibel dan sah.

Proses analisa kualitatif mencakup serangkaian aktivitas sistematis meliputi pengakumulasian materi informatif, penyederhanaan data, visualisasi informasi, serta elaborasi konklusi dari temuan penelitian (Saadah, 2022: 59). Paradigma kualitatif, sebagaimana diinterpretasikan oleh Denzin & Lincoln dalam (Fadli, 2021: 36), merupakan eksplorasi yang memanfaatkan setting naturalistik dengan tujuan memaknai fenomena kontekstual melalui berbagai instrumen metodologis. Perspektif Erickson dalam (Nurfadhillah dkk, 2021: 228) menekankan bahwa eksplorasi kualitatif

berupaya mengidentifikasi dan menggambarkan secara naratif berbagai aktivitas serta menekankannya terhadap keberadaan subjek penelitian. Kirk & Miller dalam (Muawanah dkk, 2023: 80) menjelaskan paradigma kualitatif sebagai tradisi distingtif dalam disiplin sosial yang secara fundamental dilepaskan pada pengamatan manusia dalam lingkup aktivitas maupun terminologinya.

Penyelidikan kualitatif merepresentasikan kategori penelitian dengan temuan yang tidak diperoleh melalui kuantifikasi statistikal atau kalkulasi numerik lainnya (Strauss & Corbin, 2003: 159). Sementara itu, Djam'an dalam (Rodiah dkk, 2024: 29) mengartikulasikan bahwa investigasi kualitatif menitikberatkan pada aspek kualitas atau esensi fundamental dari karakteristik suatu entitas. Imam Gunawan dalam (Sari dkk, 2022: 13) berpendapat bahwa eksplorasi kualitatif tidak diinisiasi dari konstruksi teoritis yang telah diformulasikan sebelumnya, melainkan bersumber dari realitas lapangan berdasarkan kondisi alamiah. Dengan demikian, penelitian naturalistik atau alamiah ini mengutamakan penekanan pada proses dan signifikansi yang tidak disubjekkah pada pengujian atau pengukuran presisi, dengan korpus data yang bersifat deskriptif. Investigasi kualitatif mendeskripsikan fenomena yang dialami secara sensoris dan diartikulasikan dalam bentuk elaborasi naratif. Karakteristik penelitian ini bercirikan naturalitas atau representasi otentik dari fenomena lapangan dengan fokus pada dimensi kualitatifnya.

Dalam konteks analisis data kualitatif, informasi yang teridentifikasi menampilkan diri dalam bentuk verbal, bukan sekuensi numerik. Akumulasi data dilakukan melalui metode diversifikasi (pengamatan langsung, dialog interaktif, ekstrak dokumentasi,

rekaman audio), yang umumnya mengalami pra-pengolahan sebelum implementasi, namun analisis tetap mengutilisasi elemen verbal yang dikemas dalam format tekstual ekstensif. Perspektif analitis ini meliputi tiga alur operasional: kondensasi data, representasi informasi, dan derivasi kesimpulan (Yuliani, 2018: 88). Metodologi kualitatif tidak menerapkan perhitungan statistik, melainkan melalui sekuensi pengumpulan, analisis informasi, dan interpretasi (Malahati, 2023: 346).

Komplementer dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengintegrasikan metode kajian literatur untuk mengakumulasi data terkait integrasi kebijakan dan perencanaan linguistik dalam domain pendidikan. Penelitian perpustakaan atau studi pustaka merupakan strategi pengumpulan informasi yang diimplementasikan melalui pemahaman dan eksplorasi konstruksi teoritis dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus investigasi (Fadli, 2021: 35). Dalam konteks metodologis ini, dilakukan pemrosesan dan/atau ekstraksi referensi untuk direpresentasikan sebagai temuan penelitian, yang kemudian diabstraksikan untuk informasi memperoleh pemahaman komprehensif, serta diinterpretasikan hingga menghasilkan pengetahuan untuk merumuskan kesimpulan.

Kajian sastra menurut perspektif Syaibani dalam (Ilfana & Hidayat, 2022: 3) merupakan segenap upaya yang dilakukan peneliti untuk mengonsolidasikan informasi yang tersimpan dengan topik atau problematika yang sedang atau akan dieksplorasi. Informasi tersebut dapat bersumber dari literatur ilmiah, laporan investigatif, karya akademis, tesis dan disertasi, regulasi, ketetapan hukum, publikasi tahunan, ensiklopedia, serta

berbagai sumber tertulis baik dalam format cetak maupun digital. Zed dalam (Sofiah dkk, 2020: 7) mengidentifikasi tiga justifikasi seleksi studi literatur sebagai pendekatan metodologis, yaitu karena: (1) permasalahan penelitian hanya dapat direspon melalui kajian pustaka dan tidak memungkinkan perolehan data lapangan, (2) sebagai kajian pendahuluan untuk memahami fenomena sosial, dan (3) reliabilitas data pustaka dalam menjawab permasalahan penelitian.

Proses analisis dalam investigasi ini diimplementasikan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metodologi ini mengintegrasikan tiga tahapan: reduksi dan penyajian data, serta derivasi konklusi. Reduksi data mengacu pada sistematisasi dan focalisasi analisis sesuai dengan kebutuhan penyelidikan (Purnamasari & Afriansyah, 2021: 211). Visualisasi data melibatkan kategorisasi informasi yang terakumulasi, dan selanjutnya dipresentasikan dalam format naratif dengan tujuan interpretasi data secara sistematis (Annisa & Mailani, 2023: 6464). Tahapan akhir berupa ekstraksi kesimpulan merupakan proses interpretasi bahan penelitian yang kemudian diterapkan untuk mendeskripsikan kesimpulan berdasarkan fenomena yang terobservasi (Putri dkk, 2021:4).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Kebijakan Bahasa dalam Pendidikan

Integrasi kebijakan bahasa dalam sistem pendidikan merupakan langkah strategis dan fundamental dalam upaya meningkatkan literasi bahasa Indonesia secara nasional. Pengembangan kebijakan bahasa tanpa perencanaan akan menghasilkan kebijakan yang tidak bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dimunculkan oleh kondisi kebahasaan (Asrifan dalam

Hamidah, 2023). Kebijakan bahasa yang dirancang secara menyeluruh dan dimasukkan ke dalam struktur kurikulum tidak hanya memberikan landasan konseptual, tetapi juga menciptakan kerangka operasional yang jelas bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, kebijakan ini bukan hanya menjadi dokumen normatif, tetapi juga menjadi pedoman praktis yang membentuk cara siswa belajar dan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu elemen penting dalam integrasi ini adalah penguatan pembelajaran bahasa Indonesia di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari dasar hingga menengah atas. Tujuannya tidak semata-mata pada penguasaan kaidah kebahasaan seperti tata bahasa dan kosakata, tetapi juga pada kemampuan siswa untuk menggunakan bahasa Indonesia secara kontekstual dalam berbagai situasi komunikasi baik formal maupun informal, baik secara lisan maupun tertulis. Artinya, siswa tidak hanya dituntut tahu apa itu bahasa Indonesia, tetapi juga bagaimana menggunakannya secara tepat, efektif, dan santun sesuai konteks sosial dan budaya. Yang dimana keberadaan bahasa Indonesia saat ini terdapat tantangan yang serius baik itu tantangan internal maupun tantangan eksternal (Susanto, 2016).

Lebih jauh, integrasi kebijakan bahasa perlu mencakup dimensi multikultural dan multibahasa Indonesia, dengan memberikan ruang bagi pengenalan dan penghargaan terhadap keberagaman bahasa daerah. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang kaya akan bahasa lokal, pendidikan bahasa Indonesia seharusnya tidak menegasikan bahasa daerah, melainkan justru mengajarkannya sebagai bagian dari warisan budaya nasional yang perlu dilestarikan. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami pentingnya bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu, tetapi juga belajar

menghormati dan menghargai identitas kebahasaan yang beragam di Indonesia.

Di era digital saat ini, integrasi kebijakan bahasa juga tidak bisa dilepaskan dari tuntutan perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi telah menghadirkan peluang dan tantangan baru dalam literasi digital (Rokhman & Pristiwati, 2023). Literasi digital menjadi kebutuhan esensial bagi generasi muda, dan kebijakan bahasa harus merespons realitas ini. Pembelajaran bahasa Indonesia perlu diselaraskan dengan cara-cara berkomunikasi digital yang kini dominan, seperti melalui media sosial, pesan singkat, forum daring, dan sebagainya. Oleh karena itu, penguasaan bahasa Indonesia yang diajarkan di sekolah juga harus mencakup keterampilan berkomunikasi secara digital baik dari segi struktur bahasa, etika berbahasa, hingga kemampuan menyampaikan gagasan secara efektif di ruang-ruang digital yang semakin luas dan terbuka.

Penguatan Kurikulum Bahasa Indonesia

Kurikulum mempunyai peran yang sangat strategis dan menentukan pada pelaksanaan dan keberhasilan Pendidikan (Suwandi, 2020). Pada kegiatan pembelajaran perlu reorientasi kurikulum dan penguatan dalam pembelajaran (Kusmiarti & Hamzah, 2019). Penguatan kurikulum merupakan aspek krusial dalam mendukung keberhasilan integrasi kebijakan bahasa dalam pendidikan. Kurikulum adalah instrumen utama yang mengarahkan proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, meninjau ulang dan menyesuaikan kurikulum bahasa Indonesia dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik menjadi langkah penting agar literasi bahasa Indonesia benar-benar dapat ditingkatkan secara bermakna.

Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan menambah porsi waktu pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tambahan waktu ini bukan sekadar untuk memperbanyak materi, tetapi untuk memberi ruang bagi proses pembelajaran yang mendalam, partisipatif, dan reflektif. Dengan waktu yang memadai, siswa bisa lebih leluasa mengeksplorasi keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang di dalam proses pembelajaran bahasanya harus didesain menjadi proses pembelajaran kekinian, kontekstual, yang bukan sekadar menekankan pada penguatan kompetensi literasi lama, namun harus berwawasan pada penguatan literasi baru yang menyatu dalam penguatan empat keterampilan berbahasa (Kusmiarti & Hamzah, 2019).

Selain itu, isi materi pembelajaran perlu diperkaya dengan konten yang kontekstual, aktual, dan relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Hal ini penting agar siswa merasa bahwa apa yang mereka pelajari memiliki manfaat langsung dan aplikatif. Ketika materi pelajaran berkaitan dengan pengalaman hidup siswa atau isu-isu yang dekat dengan mereka, motivasi belajar meningkat dan pembelajaran menjadi lebih bermakna.

Kurikulum bahasa Indonesia juga harus dirancang untuk mengembangkan keterampilan berbahasa secara terpadu. Artinya, kegiatan belajar tidak boleh hanya berfokus pada satu aspek kebahasaan saja, misalnya menulis, tanpa diimbangi dengan keterampilan lain seperti membaca atau berbicara. Penguasaan bahasa yang baik dan benar memerlukan sinergi dari semua keterampilan tersebut agar siswa mampu berkomunikasi secara efektif dalam berbagai situasi.

Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Indonesia

Guru merupakan faktor terpenting dalam kompetensi pembelajaran, yang menjadi pelaksana utama kurikulum dan ujung tombak dalam mengimplementasikan

kebijakan pendidikan di lapangan (Kusmiarti & Hamzah, 2019). Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru bahasa Indonesia menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan kebijakan bahasa di sekolah. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas guru secara langsung memengaruhi efektivitas pembelajaran dan pencapaian literasi siswa.

Kompetensi guru harus mencakup penguasaan mendalam terhadap materi bahasa Indonesia, termasuk pemahaman atas tata bahasa, kosakata, wacana, serta dinamika perkembangan bahasa di masyarakat. Di samping itu, guru juga perlu memiliki kemampuan pedagogis untuk merancang pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Dalam konteks integrasi kebijakan bahasa, guru harus mampu menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi strategi pembelajaran yang konkret dan kontekstual.

Keterampilan memanfaatkan teknologi digital juga semakin penting di era sekarang (Kusmiarti & Hamzah, 2019). Guru bahasa Indonesia dituntut mampu menggunakan berbagai platform digital untuk menunjang proses belajar-mengajar—baik dalam bentuk media interaktif, forum diskusi daring, hingga asesmen berbasis digital. Dengan teknologi, pembelajaran bahasa bisa menjadi lebih fleksibel, menarik, dan sesuai dengan gaya belajar generasi digital.

Selain itu, guru juga harus dibekali dengan kemampuan evaluasi yang komprehensif, yakni mampu menilai perkembangan siswa secara menyeluruh tidak hanya dari aspek pengetahuan, tetapi juga dari sikap dan keterampilan berbahasa. Kompetensi ini akan mendukung terwujudnya sistem penilaian yang adil, objektif, dan membangun. Semua itu membutuhkan dukungan dari institusi pendidikan melalui program pelatihan dan pengembangan profesional yang

berkelanjutan, agar guru terus berkembang sesuai tuntutan zaman.

Peran Pemangku Kepentingan Terhadap Implementasi Kebijakan Bahasa

Menurut Kusmiarti & Hamzah (2019) menyatakan bahwa bahasa merupakan penghela ilmu pengetahuan dan memiliki dua peran penting, yaitu meningkatkan penguasaan berbahasa serta membentuk kompetensi literasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan bahasa tidak hanya ditentukan oleh peran sekolah dan guru, tetapi juga bergantung pada sinergi berbagai pemangku kepentingan. Kebijakan pendidikan berskala nasional seperti ini membutuhkan keterlibatan lintas sektor guna memastikan efektivitas pelaksanaannya di seluruh lapisan masyarakat. Pelaksanaan pendidikan dituntut mampu menyiapkan murid menjadi manusia yang mempunyai perilaku dan nilai yang berlaku serta mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan hidup yang berubah-ubah (Suwandi, 2020).

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif dan menyediakan dukungan nyata dalam bentuk regulasi, pendanaan, serta program pendampingan. Tanpa dukungan dari pemerintah, kebijakan cenderung berhenti pada tataran dokumen dan tidak memiliki daya dorong di lapangan. Konsep kebijakan pendidikan bukan hanya dibatasi dalam dokumen-dokumen formal yang dihasilkan oleh pemerintah, melainkan juga meliputi serangkaian prinsip, nilai, dan tujuan yang membimbing dalam mengambil sebuah keputusan pada dunia pendidikan (Ball dalam Iswahyudi dkk, 2023).

Lembaga pendidikan, khususnya sekolah dan universitas, berperan penting dalam mengimplementasikan kebijakan bahasa ke dalam kurikulum dan proses

belajar. Mereka juga bisa menjadi pusat riset dan inovasi dalam pengembangan pembelajaran bahasa, menciptakan model-model praktik baik yang bisa direplikasi di tempat lain.

Komunitas bahasa seperti organisasi literasi, penulis, akademisi, dan penggiat budaya juga memainkan peran penting dalam memberi masukan, melakukan advokasi, dan menciptakan ekosistem kebahasaan yang hidup di masyarakat. Di sisi lain, masyarakat umum, termasuk orang tua, turut menentukan keberhasilan implementasi ini melalui pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik di rumah dan lingkungan sosial.

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bahasa dalam Pendidikan

Monitoring merupakan prosedur kebijakan pendidikan yang dipergunakan supaya bisa menghasilkan informasi tentang sebab akibat keputusan-keputusan yang dapat mencerminkan antara hubungan pelaksanaan program kebijakan (Jaysurrohman dkk, 2021). Setiap kebijakan yang diterapkan harus disertai dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat. Tanpa proses evaluasi yang sistematis, tidak mungkin diketahui apakah kebijakan bahasa sudah berjalan sesuai harapan atau perlu diperbaiki.

Monitoring dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kebijakan di berbagai satuan pendidikan, termasuk mengukur indikator kunci seperti peningkatan kemampuan berbahasa siswa, efektivitas kurikulum, kesiapan guru, dan tingkat dukungan pemangku kepentingan. Data dari proses ini menjadi landasan untuk evaluasi lebih lanjut.

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan sebuah kegiatan supaya diketahui bahwa kebijakan pendidikan itu benar-benar sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dan mampu memunculkan dampak nyata terhadap khalayak sesuai dengan yang

diharapkan (Jaysurrohman dkk, 2021). Evaluasi bertujuan untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan, mengidentifikasi hambatan, dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk pengembangan di masa depan. Agar evaluasi objektif, proses ini perlu melibatkan semua pihak dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat.

Kebijakan pendidikan adalah unsur akan kebijakan publik yang tidak bisa dipisahkan dengan sendirinya tanpa adanya sebuah evaluasi (Jaysurrohman dkk, 2021). Evaluasi yang baik akan memberikan arah baru bagi penyempurnaan kebijakan serta memperkuat pengambilan keputusan yang berbasis data. Dengan begitu, kebijakan bahasa dalam pendidikan akan terus berkembang dan relevan dengan dinamika zaman.

Sinergi antara Kebijakan Bahasa dan Kebijakan Pendidikan

Efektivitas kebijakan bahasa dalam pendidikan sangat ditentukan oleh keselarasan dengan kebijakan pendidikan secara keseluruhan apalagi perkembangan teknologi saat ini yang juga berdampak signifikan pada kebijakan pendidikan (Iswahyudi dkk, 2023). Kedua kebijakan ini harus saling mendukung dan tidak berjalan secara parsial. Penguasaan bahasa Indonesia harus ditempatkan sebagai salah satu tujuan utama pendidikan nasional, karena bahasa merupakan alat utama berpikir, belajar, dan berkomunikasi. Beberapa bentuk sinergi yang perlu dibangun antara kebijakan bahasa dan kebijakan pendidikan mencakup

pengembangan kurikulum terpadu, penyusunan standar kompetensi yang selaras, penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai, serta alokasi anggaran yang proporsional. Selain itu, kebijakan ini juga harus selaras dengan program penguatan

budaya literasi nasional. Tanpa sinergi ini, kebijakan bahasa akan sulit diimplementasikan secara efektif. Sebagaimana yang dijelaskan Iswahyudi dkk (2023) bahwa hal tersebut mestinya diperhatikan lebih detail untuk pengembangan kegiatan dalam pendidikan. Namun dengan koordinasi yang baik, kebijakan bahasa tidak hanya menjadi bagian dari sistem pendidikan, tetapi juga menjadi alat transformasi sosial dalam membentuk generasi yang literal, berpikir kritis, dan mampu berkontribusi di era global.

PENUTUP

Integrasi kebijakan bahasa ke dalam sistem pendidikan merupakan langkah strategis untuk memperkuat literasi bahasa Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman, terutama di era digital. Kebijakan bahasa yang terstruktur, bila diterapkan secara menyeluruh melalui penguatan kurikulum, pelatihan guru, dan sinergi lintas pemangku kepentingan, mampu menjadi fondasi bagi pembelajaran bahasa yang lebih kontekstual, komunikatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain menekankan pada penguasaan empat keterampilan berbahasa, kebijakan ini juga harus mencakup penghargaan terhadap keberagaman bahasa daerah dan penguatan literasi digital. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada peran aktif pemerintah, lembaga pendidikan, guru, komunitas bahasa, dan masyarakat luas. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata. Dengan sinergi yang baik antara kebijakan bahasa dan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, I. S., & Mailani, E. (2023). Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Siswa Dalam Pembelajaran Tematik Dengan Menggunakan Metode Miles Dan Huberman Di Kelas Iv Sd Negeri 060800 Medan Area. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 6460-6477.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Hamidah, S. (2023). Optimasi Sumber Daya Dan Kolaborasi Multitahap (Pentaheliks): Suatu Kajian Perencanaan Bahasa. *Madah: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 14 (2), 163-177.
- Handiyani, M., & Abidin, Y. (2023). Peran Guru Dalam Membina Literasi Digital Peserta Didik Pada Konsep Pembelajaran Abad 21. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(2), 408- 414.
- Handiyani, M., & Abidin, Y. (2023). Peran Guru Dalam Membina Literasi Digital Peserta Didik Pada Konsep Pembelajaran Abad 21. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(2), 408- 414.
- Hernadi, D., Mulia, W. R., & Riyanto, J. (2023). Dampak Kebijakan Bahasa Terhadap Pengembangan Literasi. *Jurnal Pendidikan*, 10(2), 45–52.
- Ilfana, A., & Hidayat, D. R. (2022). Konseling Karir Untuk Meningkatkan Kematangan Karir Siswa: Kajian Pustaka. *Journal Of Syntax Literate*, 7(7).
- Iswahyudi, M. S., Irianto, I., Salong, A., Nurhasanah, N., Leuwol, F. S., Januaripin, M., & Harefa, E. (2023). Kebijakan Dan Inovasi Pendidikan: Arah Pendidikan Di Masa Depan. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Jaysurrohman, R. A., Supandi, M., Wardani, M. T., Puthaen, M., & Setiawan, F. (2021). Problematika Dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan Di Indonesia.
- Kusmiarti, R., & Hamzah, S. (2019). Literasi Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Era Industri 4.0. In *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra* (Pp. 211-222).
- Malahati, F., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341- 348.
- Muawanah, I., Fikriawan, S., & Fathoni, K. (2023). Implementasi Zakat Fitrah Tanpa Melibatkan Amil Zakat. *Social Science Academic*, 1(1), 78-86.
- Nurfadhillah, S., Nurfalalah, K., Amanda, M., Kauniyah, N., & Anggraeni, R. W. (2021). Penerapan Media Visual Untuk Siswa Kelas V Di Sdn Muncul 1. *Edisi*, 3(2), 225- 242.
- Purnamasari, A., & Afriansyah, E. A. (2021). Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Smp Pada Topik Penyajian Data Di Pondok Pesantren. *Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(2), 207-222.
- Putri, A. P., Rahhayu, R. S., Suswandari, M., & Ningsih, P. A. R. (2021). Strategi Pembelajaran Melalui Daring Dan Luring Selama Pandemi Covid-19 Di Sd Negeri Sugihan 03 Bendosari. *Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 2(1), 1-8.
- Rodiah, S., Aisah, A., & Fadilah, S. V. N. (2024). Pengaruh Pola Asuh Demokratis Dapat Membentuk Karakter Kemandirian Anak Melalui Kegiatan Parenting Untuk Mengatasi Dampak Pola Asuh Otoriter Di Kelompok B Paud Al Hidayah. *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(1), 27-32.
- Rokhman, F., & Pristiwati, R. (2023). Dari Dunia Offline Ke Dunia Online: Merangkul Literasi Digital. *Jurnal Pembahsi (Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia)*, 13(1), 44- 54.
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54-64.
- Safitri, I., Marsidin, S., & Subandi, A. (2020). Analisis Kebijakan Terkait Kebijakan Literasi Digital Di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 123–130.

- Sari Dkk, (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Malang: Unisma Press.
- Silalahi, D. E. (2021). Literasi Digital Berbasis Pendidikan. Repository Universitas Hkbp Nommensen.
- Sofiah, R., Suhartono, S., & Hidayah, R. (2020). Analisis Karakteristik Sains Teknologi Masyarakat (Stm) Sebagai Model Pembelajaran: Sebuah Studi Literatur. *Pedagogi: Jurnal Penelitian Pendidikan*, 7(1), 1-18.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 158-165.
- Suriani, A. I., & Hadi, S. (2022). Kebijakan Literasi Digital Bagi Pengembangan Karakter Peserta Didik. *Jurnal Kajian Pendidikan Dasar*, 7(1), 54–60.
- Supriadi, S., Ernati, E., Nurdiansyah, E., Jumriati, J., Tumpu, A. B., Room, R., & Syukriadi, D. (2025). Student Learning Innovation Blind Through Approach Solution Case Integrated Audio Based Learning Management System at Islamic University of Makassar. *Journal of Research and Multidisciplinary*, 8(1), 1030-1043.
- Supriadi, S., Jufri, J., & Sultan, S. (2023). The Effectiveness of Critical Discourse-Based Writing Teaching Materials for Growing Student Nationalist Character in Higher Institutions. *Journal of Research and Multidisciplinary*, 6(2), 735-748.
- Susanto, H. (2016). Membangun Budaya Literasi Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Menghadapi Era Mea. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(1), 12-16.
- Suwandi, S. (2020, October). Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa (Dan Sastra) Indonesia Yang Responsif Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Dan Kebutuhan Pembelajaran Abad Ke-21. In Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra (Pp. 1-12).
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling. *Quanta: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 2(2), 83-91.